



SALINAN  
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14/S TAHUN 2022  
TENTANG  
PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR  
PADA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN  
DAN INVESTASI TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI  
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri Koordinator pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri Koordinator Pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
3. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 265);
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri Koordinator Pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1277);
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1331);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR PADA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI TAHUN 2022.

- KESATU : Menetapkan Program Penyusunan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2022 yang selanjutnya disebut P3MK Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : P3MK Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta kebijakan dan kebutuhan lembaga sesuai dengan kewenangan Menteri Koordinator.
- KETIGA : Pelaksanaan P3MK Tahun 2022 dilaporkan secara berkala kepada Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 04 Februari 2022

a.n. MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN  
DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR,

Ttd

AYODHIA G. L. KALAKE

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI  
Kepala Biro Hukum,



Budi Purwanto  
NIP. 19640215 199003 1 002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14/S TAHUN 2022 TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR PADA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI TAHUN 2022

PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR PADA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI TAHUN 2022

No.	Judul	Pemrakarsa	Latar Belakang	Tujuan	Sasaran	Materi Pokok	Tindak Lanjut	Status		Instansi/Unit Kerja Terkait	Waktu Penyusunan
								Perubahan	Baru		
<b>Deputi Koordinasi Bidang Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan</b>											
1	Rancangan Permenko tentang Struktur dan Tata Kerja Komite Pengarah, Sekretariat, dan Kelompok Kerja Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional	D4	Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2021, maka perlu menetapkan Struktur dan Tata Kerja Komite Pengarah, Sekretariat, dan Kelompok Kerja	Dalam rangka memberikan arah kebijakan dan pelaksanaan instrument NEK untuk mencapai NDC dan pengendalian	Komite Pengarah Sekretariat, dan Kelompok Kerja Penyelenggaraan NEK untuk Pencapaian Target	Struktur dan tata kerja Komite Pengarah, Sekretariat dan Kelompok Kerja Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang	<b>Perpres 98/2021</b> tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang		✓	1. Kemenko Perekonomian 2. Kemendagri 3. Kemenkeu 4. KLHK 5. Bappenas 6. KESDM 7. Kemenperin 8. Kemenhub 9. Kem PUPR 10. Kementan 11. KKP	2022

			Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional	n emisi GRK dalam pembangunan	Kontribusi yang ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi GRK dalam pembangunan nasional	ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional	ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional,			12. Kemendag 13. BMKG 14. BRGM	
<b>Deputi Koordinasi Bidang Investasi dan Pertambangan</b>											
2	Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Rancangan Permenko Marves Tentang Komite Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung	D6	Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta Dan Bandung mengamanahkan dibentuknya Komite Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung	Instrumen untuk mendukung pelaksanaan tugas Komite Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung	Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Keuangan, Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Menteri Perhubungan	Tugas Komite, Mekanisme kerja komite dan mekanisme pengambilan keputusan Komite	Perpress No 93 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perpress No. 107 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Kereta Cepat Antara		✓	Kemenko Marves, Kemenkeu, Kemen BUMN dan Kemenhub	2022

							Jakarta Dan Bandung				
<b>Biro Perencanaan</b>											
3.	Rancangan Peraturan Menteri Koordinator tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Biro Perencanaan	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Pelaksanaan dalam pemberian tunjangan pegawai Kemenko Marves	Seluruh pegawai Kemenko Marves	Hak dan Kewajiban Pegawai dalam mendapatkan Tunjangan Kinerja	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi		✓	KemenPAN &RB, BKN	2022
<b>Biro Umum</b>											
4	Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Biro Umum	Perlunya pedoman penyelenggaraan administrasi umum naskah dinas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang dapat menciptakan	Menciptakan kelancaran komunikasi tulis yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritima	Seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemariti	Pedoman pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan	Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman	✓		Kementerian Hukum dan HAM	Carry Over 2021

			komunikasi efektif dan efisien	n dan Investasi	man dan Investasi	penyimpanan naskah dinas, serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan	Tata Naskah Dinas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman				
5	Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Biro Umum	Perlunya pengaturan terhadap kegiatan pengelolaan arsip terjaga sesuai rekomendasi hasil pengawasan kearsipan tahun 2021 ng Kemaritiman	Dalam rangka penyelamatan arsip yang tercipta, terutama arsip terjaga di lingk Kemenko Marves	Seluruh unit kerja di lingkungan Kemenko Marves dalam pengelolaan arsip dinamis	Berisi penambahan pasal-pasal yang mengatur kebijakan pengelolaan arsip terjaga	Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip	✓		Arsip Nasional dan Kementerian Hukum dan HAM	2022
6	Rancangan Peraturan Menteri Koordinator tentang Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Biro Umum	Kebutuhan organisasi dalam pedoman pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dan kompetitif di lingkungan Kemenko Marves	Tersusunnya instrumen bagi tata cara penyelenggaraan pengisian jabatan pimpinan tinggi	Seluruh unit kerja di lingkungan Kemenko Marves	Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi			✓	Biro Umum Kemenko Marves, Kementerian PAN RB	Carry Over 2021

Biro Hukum											
7.	Rancangan Permenko tentang Uraian Fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Koordinator Jabatan Fungsional di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Biro Hukum	Tindak lanjut dari Permenko Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Tersusunnya uraian tugas dari JPT Pratama dan Koordinator Jabatan Fungsional	JPT Pratama dan Koordinator Jabatan Fungsional	Uraian tugas	Proses penyusunan		✓	Kementerian PAN RB, Kementerian Hukum dan HAM	Carry Over 2021
Biro Komunikasi											
8.	Rancangan Permenko tentang Layanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Biro Komunikasi	Kepmenko Nomor 145/S Tahun 2020 tentang Organisasi PPID Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Agar sejalan dengan Permenko Nomor 2 Tahun 2020					✓	Biro Komunikasi Kemenko Marves, KIP	Carry Over 2021

a.n. MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN  
DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR,

Ttd

AYODHIA G. L. KALAKE

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI

Kepala Biro Hukum,

